

ANOMIE DAN MODAL SOSIAL: MEMAHAMI KRISIS MULTIDIMENSIONAL

Oleh: Rusydi Syahra, Ph.D dengan Drs. M. Azam Manan¹.

PENDAHULUAN

Ketika baru terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan dari orde baru dan transisi kepada pemerintahan orde 'reformasi' yang lebih demokratis sekarang ini banyak orang berharap krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia akan segera dapat teratasi. Berbagai upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi dan menciptakan pemerintahan yang bersih memang telah dilakukan. Dalam berbagai forum dan kesempatan para intelektual di negeri ini mulai berbicara tentang masyarakat madani, suatu lapisan masyarakat intelektual yang memiliki kemampuan kontrol sosial dan yang diharapkan berperan menjembatani kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan penguasa. Tetapi parahnya kerusakan yang terjadi dalam hampir segala bidang kehidupan masyarakat hingga saat ini telah menyebabkan upaya apapun yang telah ditempuh segenap lembaga yang berwenang belum berhasil menunjukkan tanda-tanda yang jelas menuju perbaikan. Bersamaan dengan itu pula semangat di belakang pemikiran ke arah pewujudan masyarakat

madani tersebut seakan-akan kembali pada titik terendah.

Sementara itu tertekan oleh kesulitan ekonomi dan sejumlah masalah lainnya yang menyangkut hak asasi yang telah berlarut-larut dialami banyak warga masyarakat mulai kehilangan kesabaran. Akhirnya sebagian mencoba menyelesaikan dengan cara sendiri-sendiri, di luar koridor hukum dan peraturan yang ada dan norma-norma kehidupan yang normal. Tampaknya masyarakat mulai berkesimpulan bahwa sekalipun hukum dan peraturan memang jelas ada tapi tidak lagi berlaku, karena para aparat bersangkutan sendiri yang seharusnya menegakkannya justru telah melanggarnya. Dalam pada itu tokoh-tokoh yang diharapkan menjadi panutan masyarakat telah mengalami erosi wibawa akibat berbagai kondisi yang berada di luar kemampuan dan kontrolnya.

Dalam manifestasi konkretnya tindakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri itu telah bermuara pada berbagai kasus konflik dan kerusuhan sosial di beberapa wilayah tanah air yang masih berlarut-larut hingga saat ini.

Berbagai cara dan pendekatan telah dilakukan untuk mengatasinya. Tetapi sejauh ini hasil yang diperoleh tampaknya belum sesuai dengan harapan. Jangankan semakin surut di berbagai wilayah tanah air keresahan dan kerusuhan sosial justru semakin meluas dan berkembang. Lebih parah lagi adalah yang berkenaan dengan konflik vertikal antara pusat dan daerah yang sejak lama terpaksa dipendam karena efektifnya tindakan represif dari pihak keamanan. Begitu terjadi pergantian kekuasaan dari rezim pemerintahan otoriter orde baru menjadi pemerintahan yang lebih 'demokratis' maka masyarakat di beberapa daerah dengan serta merta memanfaatkan perubahan situasi guna mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kesempatan mengurus kepentingan sendiri dalam arti seluas-luasnya, bahkan ada yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Respons dari pemerintah pusat berupa tawaran otonomi yang seluas-luasnya seakan-akan sudah sangat terlambat untuk mengatasi gejala keinginan dan tekad berbagai daerah untuk mengurus diri sepenuhnya.

Mengingat sangat mendasarnya perubahan sosial yang sedang berlangsung tampaknya diperlukan adanya suatu pengkajian yang lebih didasarkan pada pemahaman tentang proses sosial yang dialami bangsa kita sekarang ini. Baik perubahan yang disebabkan oleh dinamika internal maupun yang terjadi sebagai akibat pengaruh global yang semakin terasa di berbagai bidang kehidupan. Sehubungan latar belakang permasalahan

di atas maka tampaknya suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep anomie dan modal sosial merupakan suatu pilihan yang tepat untuk mengkaji permasalahan multidimensional yang sedang dihadapi sekarang ini. Didahului dengan uraian tentang perspektif teoritis dan metodologi yang digunakan tulisan ini akan menyajikan temuan penelitian yang dilakukan di dua lokasi, Jawa Barat dan Sumatera Barat.

PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG ANOMIE DAN MODAL SOSIAL

Penelitian ini menggunakan konsep anomie dan modal sosial untuk menjelaskan permasalahan. Konsep anomie diperkenalkan pertama kali oleh Emile Durkheim, salah seorang tokoh utama sosiologi klasik, dalam upaya memberi interpretasi terhadap proses perubahan sosial mendasar yang terjadi dalam masyarakat Perancis sebagai dampak dari revolusi industri. Konsep tersebut telah dikembangkan menjadi lebih operasional oleh sejumlah pakar ilmu-ilmu sosial sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan proses perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia pada waktu ini.

Anomie dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak mampu memberi makna terhadap perubahan dan perkembangan yang sedang berlangsung di berbagai bidang kehidupan. Situasi *anomie* ini selalu

lainnya berpendapat bahwa kemungkinan untuk mencapai kemakmuran lebih besar pada masyarakat yang rasa saling percaya sesama anggotanya lebih kuat atau masyarakat tinggi amanah (*high trust society*) dibandingkan dengan masyarakat yang rendah amanah (Fukuyama, 1996).

Saling percaya akan kemauan baik dan kesediaan untuk saling membantu antara satu sama lain merupakan salah satu modal sosial terpenting, baik dalam suatu komunitas masyarakat maupun dalam hubungan antar kelompok untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Sebaliknya, rasa saling tidak percaya atau *mutual distrust* yang semakin menonjol bisa merupakan indikasi bagi tidak mungkinnya suatu masyarakat mencapai kemajuan. Modal sosial sebagai penentu pengembangan potensi sumberdaya alam dan potensi kemandirian masyarakat akan menjadi lebih bermakna apabila terdapat secara memadai sikap toleransi, solidaritas, kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, dan empati, yang cukup tinggi antara sesama warga suatu komunitas atau antar kelompok sosial.

Bertolak dari uraian tentang kedua konsep di atas maka secara hipotesis dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan (asosiasi) yang negatif antara tingkat anomie dan tingkat keberadaan modal sosial. Dalam situasi anomie yang ditandai banyaknya ketidakpastian dalam bidang kehidupan politik dan

ekonomi orang cenderung mendahulukan keamanan dan kepentingan diri atau kelompok sendiri. Demi mempertahankan kepentingan sendiri itu orang-orang lain di luar kelompoknya sering dicungai dan dianggap sebagai ancaman. Dengan demikian melemahnya modal sosial berpangkal dari meningkatnya sikap saling curiga dan saling tidak percaya antar individu maupun antar kelompok sebagai akibat dari situasi anomie ini.

Dapat dikatakan sebaliknya bahwa semakin rendah tingkat keberadaan modal sosial maka semakin tinggi tingkat anomie dalam suatu masyarakat. Rendahnya tingkat saling percaya dan solidaritas antar anggota kelompok-kelompok sosial mencerminkan tingginya ketidakpastian dalam hubungan interaksi antar kelompok. Ini menunjukkan pula tingginya tingkat anomie yang dialami orang-orang yang menjadi anggota kelompok bersangkutan.

Sekalipun anomie dapat diukur melalui banyak cara, tetapi penelitian ini meminjam instrumen tentang skala anomie yang digunakan dalam penelitian di Cina (Hanlin, et al., 1997). Skala anomie ini terdiri dari empat variabel utama, yakni:

"Ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, yakni adanya perasaan mengalami deprivasi baik relatif maupun absolut sebagai akibat terenggutnya hak-hak asasi di berbagai bidang.

"Ketidakpercayaan pada pemerintah, yakni berkurang atau hilangnya kepercayaan akan kemampuan perne-

rintah untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, terutama krisis ekonomi.

"Pesimisme menghadapi masa depan, yakni ketidakyakinan untuk bisa menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik pada waktu akan datang yang tidak terlalu lama.

"Anomie individu, yakni adanya perasaan teralienasi dan disorientasi karena norma, nilai dan keyakinan yang dihayati tidak mampu digunakan sebagai alat interpretasi terhadap banyak gejala dalam proses perubahan yang sedang berlangsung di berbagai bidang kehidupan.

Keempat variabel utama anomie mencerminkan fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dan timbul secara berurutan mulai dari yang umum sifatnya sampai kepada yang lebih individual. Perasaan ketidakpuasan merupakan gejala yang umum dirasakan secara meluas yang timbul sebagai dampak dari krisis di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya. Sementara anomie individu merupakan dampak psikologis situasi anomie yang khusus dirasakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, seperti perasaan bingung, terasing, marah tanpa sasaran yang jelas, dan putus asa.

Di atas telah dijelaskan secara singkat bahwa konsep modal sosial telah digunakan secara luas oleh banyak peneliti untuk menelaah berbagai fenomena sosial. Dan belum ada kesepakatan mengenai pengertian yang baku tentang konsep

tersebut. Oleh karena itu maka sesuai dengan fenomena masyarakat yang diteliti modal sosial dalam penelitian ini diartikan sebagai seperangkat karakter sosial yang mencerminkan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki sebuah komunitas atau kelompok sosial, yang kualitasnya menentukan cara para anggota komunitas atau kelompok sosial bersangkutan berperilaku dalam interaksi di antara sesamanya, dan cara mereka menyikapi atau merespon segala sesuatu yang datang dari luar kelompoknya. Jaringan dan interaksi dalam institusi sosial akan dapat berlangsung baik dan berkelanjutan apabila pihak-pihak yang terlibat memiliki semua ciri karakter tersebut secara memadai. Dalam penelitian ini modal sosial dilihat dan diukur melalui beberapa variabel karakter sebagai berikut.

"Kepercayaan: atau sifat amanah (*trust*) adalah kecenderungan untuk menepati sesuatu yang telah dikatakan atau diikrarkan baik secara lisan maupun tulisan. Adanya sifat amanah ini menjadi alasan utama bagi kesediaan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dengan keyakinan bahwa yang bersangkutan akan menepati janji atau memenuhi kewajibannya.

"Solidaritas: kesediaan untuk secara sukarela ikut menanggung suatu konsekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi suatu masalah.

"Toleransi: kesediaan untuk

memberikan konsesi atau kelonggaran, baik dalam bentuk materi maupun non-materi sepanjang tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat prinsipil.

Ketiga unsur modal sosial di atas, terutama kepercayaan atau sifat amanah merupakan unsur yang paling utama menentukan keberlangsungan hubungan sosial (Misztal, 1996). Selain ketiga unsur di atas dalam penelitian ini juga ditelaah tujuh karakter lainnya yang juga dapat dianggap sebagai unsur modal sosial, karena tingkat keberadaan unsur-unsur ini juga menentukan seberapa jauh suatu kelompok masyarakat berhasil dalam mencapai tujuan bersama. Ketujuh unsur tersebut adalah:

Tanggungjawab: Kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai cerminan rasa peduli terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

Kerjasama: suatu keadaan yang mencerminkan kesediaan dari semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi yang seimbang dalam melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Kebersamaan: sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya kesediaan untuk turut terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Kemandirian: sikap dan perilaku yang mengutamakan kemampuan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada atau mengharapkan bantuan orang lain.

Keterbukaan: kesediaan untuk menyampaikan secara apa adanya segala hal

yang orang lain yang berkepentingan menganggap bahwa mereka perlu mengetahuinya.

Keterusterangan: kesediaan untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya dipikirkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan *ewuh pakewuh*, *sungkan*, atau takut.

Empati: kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain

Dapat kiranya dipahami bahwa keseluruhan karakter di atas tidak selalu muncul secara bersamaan dalam setiap interaksi atau peristiwa sosial. Masing-masing muncul atau diperlukan dalam peristiwa sosial yang berbeda. Tetapi dapat dikatakan bahwa, "kepercayaan" atau amanah merupakan unsur utama modal sosial. Oleh karena itu juga dalam literatur sosiologi kontemporer "*trust*" mulai dipandang sebagai suatu konsep sentral untuk melihat keberlangsungan suatu kelompok sosial (Luhman, 1979; Eisenstadt, dan Roninger, 1984; Misztal, 1996; Seligman, 1997; Sztompka, 1999). Para sosiolog akhirnya "menemukan" suatu fakta yang jelas dan sederhana bahwa tanpa amanah kehidupan sosial sehari-hari yang sudah kita anggap "*taken for granted*" tidak mungkin berlangsung (Good, dalam Sztompka, 1999:ix). Amanah merupakan komponen yang harus ada agar hubungan sosial dapat terus berlanjut (Seligman, 1997:13).

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini beranggapan kondisi

kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang hingga waktu ini belum menunjukkan kepastian perubahan yang jelas ke arah perbaikan, telah menyebabkan semakin meluasnya gejala anomie dalam masyarakat. Merosotnya kemampuan perangkat norma dan nilai dan keyakinan yang selama ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan interpretasi terhadap perubahan yang berlangsung di berbagai bidang telah menyebabkan banyak warga masyarakat yang merasa kehilangan pegangan dan sebagian di antaranya melakukan "retreat" atau melarikan diri dari kehidupan yang nyata dengan berbagai cara, seperti mengonsumsi bahan-bahan psiko-tropika.

Sebagian lagi, terhimpit oleh kondisi kehidupan yang serba tidak pasti, malahan dengan mudah bisa ikut terseret arus melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Mudah-mudahan warga masyarakat melakukan tindakan apa saja tanpa adanya rasa malu dan bersalah dapat dipahami karena situasi kehidupan yang semakin anomis telah menyebabkan terjadinya erosi pada modal sosial yang dimiliki. Pada akhirnya situasi anomie dan merosotnya modal sosial inilah yang kiranya telah menyebabkan begitu mudahnya terjadi konflik sosial dimana-mana dengan berbagai akibatnya.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu studi pendahuluan yang memetakan situasi

anomie dan keberadaan modal sosial pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Situasi anomie dapat dilihat dari kesulitan individu untuk beradaptasi yang berakibat hilangnya kemampuan untuk melakukan orientasi sosial secara umum, meningkatnya rasa tidak aman dan terpinggirkan, meningkatnya ekspektasi secara tak terkendali, perasaan deprivasi relatif ataupun absolut dan berkembangnya dorongan untuk mempertanyakan kehandalan nilai-nilai dasar yang ada serta norma-norma yang berlaku. Akumulasi dari kondisi psikologis inilah yang kemudian bisa menjadi pemicu kerusuhan dan konflik sosial. Bertolak dari asumsi demikian temuan-temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk meletakkan dasar bagi pengembangan metode deteksi dan peringatan dini dalam bidang sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan data. Lokasi penelitian adalah Bandung, ibukota propinsi Jawa Barat (Jabar), dan Padang, ibukota propinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bandung dipilih dengan pertimbangan bahwa kota ini memiliki masyarakat yang sudah sejak lama resah karena adanya rasa ketidakadilan dalam menikmati kemakmuran ekonomi. Hal ini terbukti seringnya terjadi kerusuhan-kerusuhan yang timbul karena ketimpangan sosial atau perasaan iri terhadap keberuntungan ekonomi yang dimiliki golongan etnis tertentu, serta

karena letupan kemarahan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut. Selain itu Bandung juga terpilih dengan pertimbangan bahwa, karena memiliki sumberdaya ekonomi yang dapat menghidupi banyak orang, kota ini sejak lama telah merupakan tujuan perantauan orang-orang dari daerah lain, termasuk dari daerah Sumatera Barat. Diperkirakan di antara kota-kota besar di Jawa, Bandung merupakan daerah perantauan kedua orang Sumatera Barat setelah Jakarta. Oleh karena banyaknya pendatang dari luar itu pula Bandung memiliki tekanan penduduk yang cukup tinggi, yang diperkirakan telah menyebabkan penduduk asli Sunda lebih merasakan semakin beratnya persaingan dalam meraih kesempatan ekonomi.

Kota Padang dianggap mewakili daerah yang relatif tenang. Kerusuhan sosial bemuatan "sara" seperti yang sering terjadi di Jabar hampir tidak pernah ditemukan di sini. Ketidakpuasan masyarakat selama ini lebih bersumber pada rendahnya tingkat amanah para pejabat yang ada di daerah ini. Dari sudut etnisitas kota ini relatif homogen. Pendatang dari luar tidak banyak yang tertarik untuk mengadu nasib di daerah ini, karena sumberdaya ekonomi yang dimiliki tidak begitu memadai. Kebanyakan pendatang dari luar hanyalah pegawai atau karyawan yang ditugaskan intansi atau perusahaannya dari pusat untuk bekerja di kota ini. Sebagian besar pendatang justru berasal dari dalam wilayah

propinsi Sumatera Barat sendiri, dan pelajar atau mahasiswa dari propinsi lain, seperti Riau dan Jambi, yang mengikuti pendidikan di kota ini. Pola konsumsi mereka yang rata-rata di atas rekan-rekan mereka yang asli penduduk setempat menyebabkan kehadiran mereka bukan menimbulkan tekanan ekonomi, tetapi justru sebaliknya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi penduduk kota ini. Kenyataan ini pula yang menjadi salah satu penyebab para pimpinan Universitas Andalas ingin menjadikan perguruan tinggi tersebut sebagai salah satu "center of excellence" di Indonesia. Penghasilan kota Padang diharapkan akan meningkat apabila makin banyak orang dari daerah lain menjadikan kota tersebut sebagai "daerah tujuan pendidikan".

Universum penelitian adalah kecamatan dalam kota. Di Bandung yang terpilih sebagai lokasi pengambilan sampel adalah kecamatan Lengkong. Sampel diambil dari delapan kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Di Padang yang terpilih sebagai lokasi pengambilan sampel adalah Kecamatan Nanggalo. Berbeda dengan di Bandung sampel di kota ini hanya diambil dari satu kelurahan yang padat penduduk yang kehidupan sosial ekonominya bervariasi mulai tingkat rendah sampai menengah atas.

Sampel ditetapkan secara purposif, yakni tingkat pendidikan responden paling rendah adalah SLTA. Penetapan ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah tidak dapat diharapkan memberi respon secara

baik kepada banyak pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Responden untuk masing-masing lokasi berjumlah 200 orang. Pengisian kuesioner untuk pengumpulan data dilakukan selama bulan Juli 2000. Para interviewer di Bandung terdiri dari para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Untuk lokasi kota Padang interviewer terdiri dari beberapa sarjana Antropologi dan Sosiologi lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas.

Data kualitatif berasal dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, formal dan informal, termasuk pejabat pemerintah daerah kecamatan dan kelurahan, tokoh agama dan pimpinan adat, tokoh pendidikan dan cendekiawan, tokoh wanita, dan pemimpin organisasi pemuda. Sebagian wawancara dilakukan secara individual dan sebagian lagi dilakukan secara kelompok. Misalnya, di Padang, wawancara dengan tokoh adat dilakukan sekaligus dengan lima anggota dewan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM), termasuk ketua umumnya.

TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN

Temuan tentang Anomie

Temuan mengenai anomie akan dilihat terutama melalui data kuesioner tentang skala anomie dengan empat variabel utama, yakni (1) tingkat ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan sekarang, (2) tingkat ketidakpercayaan

terhadap penyelenggara negara, (3) pesimisme akan perbaikan keadaan, dan (4) anomie individu. Di bawah ini akan disajikan secara singkat temuan-temuan lapangan dengan membandingkan respons antara dua lokasi penelitian, Jawa Barat dan Sumatera Barat.

Tingkat ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan sekarang

Ketidakpuasan sebagian besar anggota masyarakat terhadap kondisi kehidupan dewasa ini bersumber pada banyak faktor. Tabel I menggambarkan sebagian temuan tentang berbagai hal yang menimbulkan ketidakpuasan tersebut yang berkaitan dengan kondisi kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Kepada responden diminta untuk memberikan pendapatnya tentang tujuh macam hal yang menggambarkan kondisi yang kemungkinan menimbulkan ketidakpuasan. Pada Tabel I terlihat bahwa mayoritas responden dari kedua daerah penelitian membenarkan bahwa ketujuh hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan kepada mereka. Tiga hal yang sama-sama dianggap sebagai yang paling menimbulkan ketidakpuasan oleh mayoritas responden adalah korupsi di bidang ekonomi dan politik yang masih terus berlangsung, tindak kriminal yang semakin meningkat dan suasana kehidupan demokratis yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Lebih dari 90 persen responden dari kedua lokasi mengakui bahwa ketiga hal tersebut yang menimbulkan ketidakpuasan.

Terutama mengenai hal yang terakhir, yakni suasana kehidupan demokratis yang masih jauh dari kenyataan. Bersama proporsi responden yang menyatakan tidak puas mengenai hal ini (Sumbar 96,0 persen dan Jabar 94,0 persen) tentunya dapat dipahami. Ketika rezim pemerintahan orde baru yang dianggap otoriter berakhir dan pemerintahan sekarang ini terpilih secara demokratis, hampir semua orang merasa bahwa perbaikan dalam kehidupan politik

dan ekonomi akan berlangsung mulus. Tetapi kenyataannya setelah hampir dua tahun berlalu masyarakat umumnya tidak melihat dengan jelas tanda-tanda ke arah perbaikan itu. Yang dipertontonkan kepada masyarakat setiap hari adalah kesibukan usaha para elit politik untuk memenangkan kepentingan kelompok dan golongan sendiri, bukannya berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki kehidupan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat luas.

Tabel 1: Penyebab Ketidakpuasan terhadap Kondisi Kehidupan Sekarang (dalam persentase)

No.	Penyebab ketidakpuasan	Sumbar (n = 200)			Jabar (n = 200)		
		1	2	3	1	2	3
1.	Jurang perbedaan antara kaya dan miskin semakin lebar	86,0	8,0	6,0	92,5	4,5	3,0
2.	Harga barang-barang dan biaya hidup yang terus meningkat	82,5	14,0	3,5	80,0	14,0	6,0
3.	Korupsi dibidang politik dan ekonomi masih belum berkurang	94,0	4,0	2,0	92,5	6,0	1,0
4.	Tindak kejahatan dalam berbagai bentuk makin meningkat	96,0	3,5	0,5	92,0	6,5	1,0
5.	Perbedaan benar dan salah dalam masyarakat semakin kabur	83,0	14,5	2,5	80,5	14,5	5,0
6.	Ketertiban dan disiplin masyarakat semakin berkurang	86,0	10,5	3,0	84,0	14,0	2,0
7.	Kehidupan demokratis yang diharapkan masih jauh dari kenyataan	96,0	4,0	-	94,0	5,0	1,0

Sumber: Hasil survei Anomie PMB-LIPI 2000

Keterangan: 1 = benar, 2 = kurang benar, 3 = tidak benar

Rasa tidak puas yang terhadap kondisi kehidupan sekarang yang langsung menyangkut kepentingan sendiri juga dapat dilihat melalui tingkat penghasilan yang diperoleh, cara pelayanan yang diperoleh dari aparat pemerintah daerah setempat, serta seberapa jauh merasa dihargai dalam pergaulan dengan masyarakat di lingkungan sendiri. Pada Tabel 2 terlihat bahwa dari sudut penghasilan responden Sumatera Barat lebih besar persentasenya yang belum puas dengan tingkat penghasilan yang diperoleh (55,5 persen), dibandingkan dengan responden Jawa Barat yang hanya 28,0 persen. Ini bisa menunjukkan suatu kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat pada umumnya dan di Sumbar khususnya, memang lebih sulit dibandingkan dengan kehidupan ekonomi masyarakat di Jabar. Dengan demikian dapat dipahami perantau akan terus mengalir keluar dari Sumatera Barat ke daerah-daerah yang lebih kaya sum-

berdaya ekonominya, terutama kota-kota besar di Jawa, termasuk Jawa Barat.

Penghargaan yang diperoleh dari sesama warga masyarakat pun menunjukkan persentase yang lebih tinggi di Jabar dibandingkan dengan di Sumbar. Boleh jadi lebih rendahnya penghargaan masyarakat ini erat kaitannya dengan tingkat penghasilan yang juga lebih rendah. Dalam kehidupan yang serba materialistis yang didorong oleh ekonomi pasar sekarang ini memang ada kecenderungan bahwa status sosial seseorang lebih ditentukan oleh penampilan secara fisik, seperti rumah dan perabotan yang dimiliki, serta harta benda lainnya yang dianggap merupakan simbol kesuksesan ekonomi. Tidak dimilikinya kekayaan materi yang dapat menunjang status sosial itu yang tampaknya turut menyebabkan cukup besar persentase responden Sumbar merasa tidak puas dengan penghargaan yang diperoleh sebagai warga di lingkungan masyarakatnya.

Tabel 2:
Ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan pribadi (dalam persentase)

No.	Penyebab ketidakpuasan pribadi	Sumbar (n = 200)			Jabar (n = 200)		
		1	2	3	1	2	3
1.	Penghasilan yang diperoleh sekarang	20,5	24	55,5	36,5	35,5	28,0
2.	Penghargaan yang diperoleh sebagai warga masyarakat	40,5	6	53,5	61,5	16	22,5
3.	Pelayanan yang diperoleh sebagai warga negara	33,5	12	64,5	36	26,5	37,0

Sumber : Hasil survei Anomie PMB-LIPI 2000

Keterangan : 1: puas, 2: kurang puas, 3: tidak puas

Tabel 2 juga memperlihatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diperoleh dari aparat pemerintah. Dalam hal ini pun ternyata bahwa rendahnya kualitas pelayanan yang diperoleh masyarakat dari aparat dan pejabat di semua tingkat birokrasi sudah merupakan gejala umum dimana-mana. Hanya 33,5 persen responden Sumbar dan 36 persen responden Jabar yang merasa puas terhadap pelayanan yang diperoleh. Sementara yang merasa tidak puas di Sumbar menunjukkan angka yang jauh lebih mencolok (64,5 persen), dibandingkan dengan di Jabar yang berjumlah 37,0 persen. Jauh lebih besarnya persentase responden Sumbar yang merasa tidak puas itu bisa menunjukkan dua hal. Pertama, birokrasi dan administrasi di Sumbar pada umumnya memang lebih parah keadaannya dibandingkan dengan di Jabar. Kedua, responden di Sumbar lebih tidak bisa mentolerir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aparat yang berurusan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sementara di Jabar, yang responden memiliki kehidupan ekonomi yang rata-rata lebih baik dibandingkan dengan responden Sumbar, dan lebih "memahami" apa yang diinginkan aparat pelayan masyarakat, lebih dapat mentolerir penyimpangan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, sehingga tingkat rasa tidak puasnya menjadi tidak begitu tinggi.

Bagaimanapun juga, secara umum data dari Tabel-tabel tentang ketidak-

puasan di atas menunjukkan bahwa bila dilihat dari sudut komitmen, sebagai salah satu kriteria pengukur tingkat amanah, maka dapat dikatakan tingkat amanah dari para pejabat pelayan masyarakat pada umumnya memang cukup rendah. Penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat amanah ini sebenarnya di luar jangkauan penelitian ini. Tetapi sebuah dugaan umum dapat dikemukakan di sini bahwa penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat telah diperburuk oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dimungkinkan untuk terus berlanjut oleh tidak adanya kepastian dalam penegakan hukum. Sejauh mana asumsi ini mengandung kebenaran tentu perlu dibuktikan melalui sebuah penelitian lain.

Ketidakpercayaan pada penyelenggara negara

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara diukur melalui sembilan pertanyaan seperti terlihat pada Tabel 3. Kesembilan pertanyaan ini merupakan variabel yang mengindikasikan seberapa jauh pemerintah menurut pandangan responden telah memberi perhatian terhadap hal-hal yang perlu diatasi agar deprivasi relatif maupun absolut yang menimbulkan keresahan masyarakat bisa semakin berkurang dan suatu masyarakat madani yang didambakan banyak kaum intelektual bisa dicapai. Tabel 3 memperlihatkan mayoritas responden di kedua

lokasi penelitian menyatakan ketidak-yakinannya terhadap kepedulian pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Misalnya, beberapa hal yang langsung berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat seperti "perbedaan yang makin mencolok antara orang kaya dan

miskin". Sejumlah 80,5 persen responden Sumbar dan 76,5 persen responden Jabar menyatakan pemerintah hanya memberikan perhatian sedikit atau sedikit sekali terhadap ketimpangan sosial ekonomi itu.

Tabel 3: Perhatian Pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (dalam persentase)

No.	Hal-hal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat	Sumbar (n = 200)				Jabar (n = 200)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Politisi yang hanya berusaha untuk kepentingan sendiri atau golongan	8,5	10,5	47,5	33,5	8,5	14,5	45	32
2.	Orang mempunyai yang suka pamer kekayaan dan kemewahan	10	12	35	43	4	10,5	43	42,5
3.	Perbedaan yang makin mencolok antara orang kaya dan miskin	11,5	8	38	42	10,5	13	34	42,5
4.	Hukum yang masih lebih ditentukan oleh kekuasaan	9,5	9,5	43	37,5	8	14	49	29
5.	Perilaku aparat/pejabat yang sering mencerminkan sikap arogan	8	16,5	34	41,5	9,5	15,5	37,5	37,5
6.	Barang-barang tiruan atau palsu dengan kualitas rendah	12,5	19	36,5	32	1,5	19,5	44	25
7.	Kenaikan segala macam iuran atau rekening yang tidak masuk akal	8,5	16	39,5	36	6,5	15,5	42	36
8.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan karena limbah dan polusi	7	16,5	45,5	31	7,5	16,5	55,5	20,5
9.	Moral dan akhlak sebagian masyarakat yang makin rusak	8	13	48	31	8	20	31	41

Sumber : Hasil Survei Anomie PMB-LIPI 2000

Keterangan : 1 = Besar, 2 = Cukup, 3 = Kurang, 4 = Sedikit sekali.

Sementara itu, seperti tergambar pada Tabel 3 di atas, juga besar sekali persentasenya, yakni 78 persen di Sumbang dan 85,5 persen di Jabar yang menyatakan sedikit atau sedikit sekali perhatian pemerintah untuk mengatasi "orang berpunya yang suka pamer kekayaan dan kemewahan", sebuah pemandangan sehari-hari yang melukai rasa keadilan rakyat miskin. Selain itu hanya 19 persen responden Sumbang dan 22 persen responden Jabar yang menilai aparat pemerintah telah memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum, sementara sebagian besar responden di kedua lokasi menganggap pemerintah tidak begitu peduli dengan kenyataan bahwa "hukum yang masih lebih ditentukan oleh kekuasaan".

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jawaban responden terhadap enam pertanyaan lainnya juga serupa. Dengan

demikian dapat disimpulkan kurangnya perhatian dan kesungguhan dalam mengatasi berbagai masalah yang merupakan penyebab berlanjutnya krisis multidimensional telah berakibat sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah saat ini untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis dan ketidakpastian dalam segala sektor kehidupan.

Pesimisme terhadap kemungkinan perbaikan

Situasi anomie yang dialami tercermin pula dalam cara responden memprediksi kemungkinan adanya perbaikan dalam kehidupan ekonomi satu mendatang (pengambilan data dilakukan pada bulan Juli 2000). Dalam hal ini tampaknya secara umum responden Sumbang lebih pesimis dibandingkan dengan rekan-rekannya di Jabar.

Tabel 4

Perkiraan responden tentang kondisi kehidupan ekonomi satu tahun yang akan datang (dalam persentase)

No.	Kategori Jawaban	Sumbang n = 200	Jabar n = 200
1.	Bisa jauh lebih baik dari sekarang	11.0	10.5
2.	Lebih baik dari sekarang	19.5	53.0
3.	Sama dengan sekarang	44.0	30.5
4.	Mungkin lebih buruk dari sekarang	24.5	5.5
5.	Mungkin jauh lebih buruk dari sekarang	1.0	0.5
	Jumlah	100.0	100.0

Sumber : Hasil survei Anomie PMB-LIPI, 2000

Seperti terlihat pada Tabel 4 di atas 63,5 persen responden Jabar merasa optimis bahwa ada kemungkinan terjadi perbaikan kehidupan ekonomi dalam satu tahun yang akan datang. Sementara di Sumbar persentase responden yang merasa optimis hanya sebesar 30,5 persen. 44 persen responden dari daerah terakhir ini mengatakan bahwa keadaannya akan tetap sama seperti sekarang, dan bahkan 25,5 persen memperkirakan kehidupan akan menjadi semakin sulit. Untuk pilihan jawaban yang terakhir ini hanya 6 persen responden Jabar yang memperkirakan demikian. Dapat diduga tingkat pesimisme yang jauh lebih tinggi pada responden Sumbar sangat erat berkaitan dengan miskinnya sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah ini.

Sebuah variabel lain tentang kondisi moral dan etika masyarakat digunakan pula untuk melihat tingkat pesimisme responden akan adanya kemungkinan perbaikan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa perbaikan situasi kehidupan ekonomi, sosial dan politik tidak mungkin bisa dilakukan apabila kualitas moral dan etika masyarakat sendiri menurun dibandingkan dengan keadaan beberapa waktu sebelumnya. Tabel 5 memperlihatkan bahwa 76 persen responden Sumbar dan 74 persen responden Jabar menganggap bahwa kualitas moral dan etika masyarakat lebih buruk dari beberapa tahun yang lalu.

Perlu dijelaskan bahwa dalam hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit kapan persisnya yang dimaksud dengan bebe-

rapa waktu yang lalu. Tetapi secara implisit para responden dapat membayangkan adanya suatu "golden age" di masa lalu dimana masyarakat lebih bermoral dan memiliki etika dibandingkan dengan pada masasekarang ini. Dengan adanya perbandingan semacam itulah bisa dilihat keterkaitan antara tingkat pesimisme akan kemungkinan terjadinya perbaikan situasi kehidupan dengan kondisi moral dan etika. Dengan kata lain ada dasar bagi responden untuk merasa pesimis, bahwa perbaikan kondisi kehidupan mustahil dapat dilakukan selama krisis moral dan etika, terutama yang terjadi pada para aktor di bidang ekonomi dan politik, masih terus berlanjut. Akan tetapi harus diakui kaitan semacam ini bersifat kualitatif dan agak subtil, dan memerlukan cara lain untuk verifikasi lebih lanjut. (lihat tabel 5)

Anomie Individu

Telah didefinisikan bahwa anomie dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dimiliki kehilangan kemampuan untuk memberi makna kepada perubahan sosial yang sedang berlangsung. Dalam situasi demikian orang akan merasa kehilangan pegangan dan merasa tidak pasti bagaimana harus bersikap dan bertindak. Selanjutnya untuk menghadapi keadaan yang serba tidak pasti mekanisme pertahanan diri menjadi semakin aktif untuk melakukan "safety first", yang berakibat antara lain orang tidak mau terlibat dan menarik diri atau *withdrawal*

Tabel 5: Persepsi responden tentang moral dan etika masyarakat (dalam persentase)

No.	Moral dan etika masyarakat pada umumnya	Sumarbar (n = 200)	Jabar (n = 200)
1.	Lebih baik daripada sebelumnya	5,5	1
2.	Sama baik dengan sebelumnya	8,5	10
3.	Sama buruk dengan sebelumnya	10	15
4.	Lebih buruk dari sebelumnya	76	74
Total		100	100

Sumber : Hasil survei Anomie PMB LIPI 2000

dari hal-hal yang dirasakan akan merugikan dirinya. Rasa curiga dan tidak percaya atau *distrust* pada orang yang tidak begitu dikenal kemungkinan juga akan semakin meningkat. Bahkan, mengalami situasi seperti ini rasa percaya diri pun bisa hilang.

Pengukuran anomie individu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh gejala-gejala di atas ditemukan pada responden. Terdapat sepuluh variabel yang digunakan untuk mengukur. Sebagian pertanyaan disusun dalam bentuk pernyataan dengan nada negatif. Maksudnya dalam keadaan 'normal' atau tingkat anomie rendah, pernyataan-pernyataan yang diajukan tersebut akan mendapat respon menolak atau tidak menyetujui isi pernyataan itu. Dari kesepuluh pernyataan yang diajukan seperti tercantum pada Tabel 6, ditemukan adanya tiga pernyataan yang dibenarkan oleh para responden dari kedua lokasi, yang

kesemuanya menunjukkan dengan jelas tingginya tingkat anomie dalam masyarakat. Yang pertama adalah pernyataan bahwa masyarakat menjadi bingung karena ucapan dan kebijakan pemerintah yang sering berubah. Mayoritas responden membenarkan tersebut (Sumarbar, 78 persen dan Jabar, 74 persen). Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa yang terjadi bukan hanya anomie individual tetapi juga anomie struktural. Pemerintah sendiri juga kebingungan dan tidak memiliki pegangan yang pasti untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Akibat dari keadaan itu dalam banyak hal sikap pemerintah tidak jelas dan berbagai kebijakan yang diambil sering mengalami perubahan. Ini ternyata, misalnya, antara lain dari kebijakan ekonomi dan moneter yang tidak jelas, penggantian beberapa anggota kabinet dan pejabat tinggi dengan alasan yang sering kontroversial, dan sebagainya.

Situasi anomie yang dirasakan secara

ra individu juga terlihat dari dua variabel pernyataan lainnya pada Tabel 6 yang dianggap benar demikian oleh mayoritas responden. Pertama, sebagian besar responden Sumbar (74,5 persen) dan Jabar (60 persen) membenarkan bahwa dalam situasi sekarang ini orang sulit untuk

membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini berarti norma-norma dan nilai-nilai yang selama ini dimiliki sudah dianggap tidak memiliki kekuatan dan kemampuan lagi untuk dipakai sebagai alat pengukur dan pembeda berbagai tindakan dan perilaku masyarakat.

Tabel 6: Tingkat Anomie Individu
(dalam persentase)

No.	Indikator anomie individu	Sumbar (n = 200)			Jabar (n = 200)		
		1	2	3	1	2	3
1.	Tidak peduli cara apapun yang ditempuh pokoknya tujuan bisa tercapai	5,5	15,5	79	1	9,5	189,5
2.	Siapa pun dapat menafsirkan peraturan sesuai dengan kepentingannya	10,5	22,5	67	9	24,5	66,5
3.	Pendidikan tinggi tidak terlalu menentukan untuk dapat kedudukan	42	27	31	20	19	61
4.	Uang paling penting dari segala-galanya bahkan melebihi pendidikan	24	22	54	9,5	11	79,5
5.	Masyarakat sering bingung karena kebijakan pemerintah sering berubah-ubah	78	10	12	71	6	23
6.	Orang kebanyakan tidak perlu ikut politik karena yang untung hanya para elit saja	44,5	34	21,5	42,5	15	42,5
7.	Segalanya berubah cepat sehingga sulit membedakan yang benar dan yang salah	74,5	12	13,5	60	10	30
8.	Sekarang sulit menemukan orang yang benar-benar dapat dipercaya	79,5	14,5	6	46,5	27	26,5
9.	Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan, soal esok bukan urusan	29	32	39	38,5	17	44,5
10.	Tidak peduli dengan orang lain, yang penting keinginan sendiri tercapai	7,5	21	71,5	2	9,5	88,5

Sumber: Hasil Survei Anomie PMB-LIPI, 2000

Keterangan : 1 = Benar, 2 = Kurang benar, 3 = Tidak benar

Proses perubahan yang terjadi baik karena dinamika internal maupun yang merupakan akibat berbagai pengaruh dari luar, yang sering disebut sebagai dampak globalisasi, memerlukan adanya seperangkat norma dan nilai yang baru dan kompatibel. Parahnya, sementara norma-norma dan nilai-nilai yang baru sulit untuk diciptakan, sistem nilai yang pernah dimiliki masyarakat pun mengalami pemiskinan. Baik karena berbagai kebijakan politik pemerintah di masa lalu, maupun karena kurangnya upaya dari generasi tua untuk meneruskan nilai-nilai yang dimiliki kepada generasi selanjutnya.

Krisis norma dan nilai ini tidak hanya terjadi pada tataran masyarakat yang bersifat informal dan tradisional, tetapi juga pada institusi kenegaraan. Banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan sampai sekarang belum diganti. Memang sudah dilakukan berbagai upaya untuk membuat undang-undang yang baru. Tetapi karena berbagai hal, seperti kurangnya pengetahuan para anggota legislatif mengenai substansi permasalahan yang ditangani, adanya perbedaan kepentingan yang dipaksakan untuk diakomodasikan, upaya membuat undang-undang yang baru itu sering tidak mencapai hasil dan kualitas yang dikehendaki oleh obyek dan pengguna undang-undang itu sendiri. Sebutlah misalnya, undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang kontroversial, undang-undang tentang penyiaran, dan sebagainya, yang semuanya menunjukkan

betapa sulitnya norma-norma formal yang baru untuk diciptakan. Sementara itu perubahan dalam berbagai bidang kehidupan terus berlangsung. Masyarakat dan bangsa Indonesia dengan perangkat norma dan nilai yang dimiliki tidak mampu memberi makna dan arah kepada perubahan dan perkembangan itu.

Indikator lainnya yang juga memperlihatkan dengan jelas parahnya anomie individu ialah persepsi responden mengenai tingkat kepercayaan di antara sesama. Pada Tabel 6 terlihat 79,5 persen responden Sumbar dan 46,5 persen responden Jabar membenarkan bahwa pada waktu ini sulit untuk menemukan orang yang benar-benar dapat dipercaya. Sekalipun persentase pada kedua lokasi menunjukkan proporsi yang mayoritas untuk masing-masing kelompok responden, perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua persentase itu patut menimbulkan pertanyaan. Mengapa tingkat ketidakpercayaan pada para responden Sumbar memiliki persentase yang jauh lebih tinggi? Apakah trauma akibat peristiwa pemberontakan masa lalu masih membekas hingga sekarang? Apakah dampak Undang-undang tentang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979, yang mengobrak-abrik tatanan masyarakat adat dalam kehidupan *bemagari* telah menyebabkan banyak orang Minangkabau merasa kehilangan salah satu tempat bergantung dan identitas diri terpenting? Ataukah karena daerah sendiri memiliki sumberdaya ekonomi yang terbatas dan terlalu sedikit untuk

bisa dibagi bersama menyebabkan mereka bersikap curiga pada orang lain yang dikira akan merebut kesempatan langka yang dimiliki?

Berbagai pertanyaan dan dugaan lain tentu dapat diberikan. Tetapi untuk mengetahui mana yang benar di antaranya tentu memerlukan suatu kajian tersendiri. Yang jelas, sebagaimana diungkapkan ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, "banyak orang sekarang ini bukan hanya tidak percaya pada orang lain, bahkan juga tidak percaya pada diri sendiri". Hilangnya *self-confidence* atau kepercayaan pada diri sendiri ini dapat mengindikasikan bagaimana parahnya anomie individu yang dialami.

Temuan-temuan tentang modal sosial

Kepercayaan merupakan variabel utama dari modal sosial. Berdasar kepercayaan akan terbina solidaritas yang kemudian memunculkan toleransi. Hubungan sosial yang sesungguhnya belum terjadi apabila solidaritas dan toleransi tidak terbentuk. Ketiganya saling mengait dan tidak dapat dipisahkan, karena yang satu menjadi penyebab adanya yang lain. Oleh sebab itu, ketiga variabel ini mutlak ada. Tegasnya, solidaritas tidak terjadi bila tidak ada kepercayaan. Suatu komunitas dapat dikategorikan sebagai komunitas dengan SDM yang handal bila ketiga variabel di atas terpelihara secara baik dalam komunitas bersangkutan.

Penelitian ini tidak hanya melihat

kondisi ketiga variabel di atas dalam komunitas sasaran penelitian melainkan lebih dari itu, yaitu mengembangkannya ke variabel-variabel lain yang relevan yang menggambarkan bahwa hubungan sosial antar sesama dalam masyarakat atau komunitas tertentu selalu didasari oleh kuat lemahnya ikatan-ikatan tertentu. Ikatan-ikatan dimaksud yang dalam penelitian ini disebut variabel tambahan itu ialah kerjasama, tanggungjawab, empati, kemandirian, kebersamaan, keterbukaan dan keterusterangan. Temuan penelitian mengenai sepuluh variabel modal sosial di atas terlihat pada tabel berikut. (lihat tabel 7)

Pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang variabel kepercayaan dalam tabel ini berkenaan dengan kondisi masyarakat yang menggambarkan kesiapan warganya untuk memberi bantuan pinjaman uang kepada teman atau tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Jawaban angka 1 (satu) merefleksikan sikap positif warga pada umumnya mau memberi pinjaman kepada yang membutuhkan karena ia yakin pinjaman tersebut akan dikembalikan. Jawaban angka 2 (dua) menandakan tidak banyak waga yang mau meminjamkan karena mereka tidak yakin pinjaman akan dikembalikan, sementara jawaban angka 3 (tiga) menandakan keadaan yang lebih buruk lagi, karena jarang sekali atau hampir tidak ada yang mau meminjamkan karena kuatir tidak akan dikembalikan.

Temuan menunjukkan bahwa di ke-

Tabel 7:
Jawaban responden mengenai 10 variabel modal sosial (dalam persen)

No.	Variabel Modal Sosial	Lokasi penelitian					
		Sumatera Barat			Jawa Barat		
		1	2	3	1	2	3
1.	Kepercayaan	32	29	39	26,5	31	42,5
2.	Solidaritas	75,5	20,5	4	67	30,5	2,5
3.	Toleransi	35	46,5	18,5	58	25	17
4.	Kerjasama	65	7,5	27,5	45,5	7,5	47
5.	Tanggung Jawab	49,5	41	9,5	51,5	35,5	13
6.	Empati	16	51,5	32,5	31	42	27
7.	Kemandirian	9,5	61	29,5	16	25	59
8.	Kebersamaan	39,5	50,5	10	23	61,5	15,5
9.	Keterbukaan	26	37	37	18,5	35,5	46
10.	Keterusterangan	52	10	38	37	17	46

Sumber: Data survey Anomie PMB-LIPI, 2000

Keterangan: 1 = tinggi, 2 = Sedang, 3 = Rendah

dua daerah penelitian tingkat kepercayaan terhadap sesama relatif rendah. Keadaan ini tampak lebih buruk di Jabar dibanding Sumbar, dimana di Jabar yang umumnya mau meminjamkan lebih kecil (26,5%), sementara yang jarang mau meminjamkan lebih besar (42,5%). Kombinasi kedua jawaban ini, meskipun jumlahnya saling berlawanan dari segi persentase, namun sesungguhnya saling mendukung dalam memposisikan Jabar sebagai daerah yang kurang mempunyai rasa kepercayaan terhadap sesama. Yang lebih mengherankan adalah responden di Jabar umumnya penduduk asli dari

lokasi penelitian, sehingga rasa saling percaya itu semestinya lebih tinggi karena sudah saling sangat mengenal, sementara di Sumbar respondennya umumnya penduduk pendatang dari luar lokasi penelitian, walaupun masih dari wilayah Sumbar sendiri.

Penjelasan yang dapat diberikan dalam menafsirkan temuan di atas adalah asumsi bahwa justru dengan saling mengenal itu warga cenderung mengabaikan makna sebuah kepercayaan karena diyakini tidak akan menimbulkan konflik yang tajam, sehingga kepercayaan tanpa disadari menjadi longgar.

Sebaliknya, karena berasal dari tempat yang berbeda kepercayaan terbentuk atas dasar saling menyegani. Penjelasan dari sudut pandang etnik terhadap temuan yang bertolakbelang ini sulit diberikan, karena terasa seakan mengada-ada.

Solidaritas dan toleransi secara alamiah merupakan implikasi dari adanya kepercayaan. Ketiga variabel ini berjalan secara paralel. Semestinya bila kepercayaan tinggi maka solidaritas dan toleransi juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi dalam temuan lapangan di dua lokasi penelitian paralelisme ini ternyata tidak seluruhnya berlaku. Hal ini dibuktikan dengan temuan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat menurut pandangan responden seperti terlihat pada tabel, akan tetapi tingkat solidaritasnya jauh lebih tinggi, yaitu 75,5% di Sumbar dan 67% di Jabar.

Tingkat solidaritas masyarakat ini dipantulkan dalam sebuah pengandaian bahwa sebagian besar warga akan segera berhamburan memberi bantuan ketika ada perampok masuk ke dalam rumah seorang warga dan warga tersebut berteriak minta tolong. Meskipun kasus ini belum atau sudah pernah terjadi, jawaban yang diberikan menggambarkan bahwa solidaritas warga terhadap sesama memang baik sekali berdasar pada pengalaman responden dalam kasus dan peristiwa yang lain, sehingga andaikata ada rumah seorang warga yang kemalingan diperkirakan sebagian besar warga yang diperkirakan sebagian besar warga yang lain akan segera membantu. Kategori jawaban 2 (dua) memperkirakan hanya

sebagian kecil yang akan datang membantu sementara yang lainnya ketakutan dan mengunci diri di rumah masing-masing. Setingkat lebih buruk daripada jawaban kategori 2, jawaban kategori 3 (tiga) memperkirakan hampir semua warga ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing. Hukum linear antara kepercayaan dan solidaritas berlaku untuk kategori jawaban 2 dan 3.

Tidak sejalanannya antara kepercayaan dan solidaritas untuk kategori jawaban satu tampaknya terjadi karena masalah yang dikemukakan dalam materi pertanyaan memang tidak sejajar dan tidak saling berkait. Pertanyaan untuk mengukur tingkat kepercayaan berkenaan dengan kesediaan warga untuk membantu meminjamkan uang kepada warga lain yang membutuhkan memang tidak ada sangkut pautnya dengan rasa solidaritas warga dalam hal membantu memberi pertolongan segera kepada warga yang rumahnya kemalingan. Tindakan membantu ini lebih bersifat spontanitas yang dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antar sesama warga yang terbentuk karena jaring komunikasi sosial mereka. Intensifnya komunikasi antar sesama lebih disebabkan karena lokasi tempat tinggal responden di Sumbar adalah di komplek yang warganya mempunyai waktu dan kesempatan relatif sama untuk kegiatan-kegiatan bersama, sementara di Jabar sepenuhnya menggambarkan begitu eratnya komunikasi antara sesama, meskipun mereka tinggal

di pemukiman penduduk secara alami. Disamping itu, tindakan spontanitas untuk membantu lebih disebabkan karena bila ia sendiri mengalami hal yang sama ingin pula memperoleh bantuan serupa.

Ketidak sejajaran ini berlaku pula dalam aspek toleransi di Jabar yang angkanya juga cukup tinggi (58%) untuk jawaban kategori 1 (satu). Di Sumbar kesesuaian antara kepercayaan dan sifat toleransi warga untuk jawaban kategori 1 (satu) memang sejalan, karena tingkat toleransi warga cukup rendah (35%), sesuai rendahnya tingkat kepercayaan (32%). Setara atau tidaknya antara tingkat kepercayaan dan toleransi sepenuhnya karena masalah yang dihadapi memang tidak saling berhubungan.

Dalam aspek toleransi persoalan yang dikemukakan adalah sebuah pengandaian atau pengalaman responden tentang tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok di lingkungan tempat tinggalnya bertengkar mengenai hal-hal yang tidak prinsipil. Pengalaannya untuk jawaban kategori satu menunjukkan bahwa salah satu atau kedua pihak yang bertengkar itu saling mengalah dan memahami pendirian pihak lain. Jawaban kategori 2 mengatakan bahwa hanya salah satu pihak yang mundur dari pertengkaran yang semestinya tidak perlu itu, namun ia tetap tidak dapat menerima pendirian lawannya. Temuan untuk jawaban kategori 2 ini tinggi di Sumbar (46,5%) dan rendah di Jabar (25%), sementara jawaban kategori 3 relatif sama rendah pada kedua lokasi yang menceritakan

bahwa ternyata tidak satu pihak pun mau mengalah dan masing-masing bersekukuh mempertahankan pendapatnya sampai pertengkaran itu usai dengan sendirinya dengan membawa kedongkolannya masing-masing.

Dari temuan di atas tampak bahwa di Jabar masyarakatnya jauh lebih demokratis dibanding Sumbar, padahal Sumbar selama ini sering menjadi contoh dan rujukan bila hendak melihat aplikasi dari sikap-sikap demokratis dalam segala hal, apalagi dalam hal yang ringan-ringan dan tidak prinsipil.

Penjelasan yang dapat disampaikan di sini adalah bahwa nilai-nilai demokratis itu sudah banyak memudar dalam diri orang Minang. Penjelasan lain yang agak bersifat apologis adalah bahwa kurang demokratisnya warga Minang berdasar pengalaman responden lebih bersifat lokalitas, sehingga tidak begitu saja langsung menggambarkan keadaan sepenuhnya seluruh warga Minang. Apapun makna dari temuan itu, sepantasnya masyarakat Minang mulai mewaspadaai perubahan-perubahan perilaku sebagian warganya yang mulai tidak kompromistis lagi terhadap perbedaan, sehingga cenderung egoistis. Padahal sikap toleran terhadap perbedaan mutlak perlu. Bukan saja karena sikap toleran itu merupakan sebagian dari jati diri orang Minang melainkan juga karena dengan sikap toleran itu komunikasi antarsesama dapat dibangun dengan lebih berarti.

Unsur modal sosial lain yang

diperhatikan dalam penelitian ini ialah kerjasama. Untuk membangun suatu kehidupan bersama kerjasama antar seluruh warga mutlak diperlukan sebagai wujud dari kesediaan untuk terlibat dalam segala hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan mengenyampingkan sikap saling menjatuhkan yang lain atau untuk melakukan persaingan yang tidak konstruktif dengannya.

Pertanyaan yang diajukan dalam mengukur tingkat kerjasama ialah keterlibatan warga dalam kepanitiaan atau sebagai penanggungjawab acara-acara bersama di lingkungan tempat tinggal, yang antara lain dengan mengambil contoh kegiatan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI. Terdapat tiga pilihan jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, warga masyarakat di lingkungannya pada umumnya bersedia duduk dalam kepanitiaan dalam bidang tugas atau seksi-seksi yang sesuai dengan kemampuan (jawaban 1). Kedua, pada umumnya, namun berebutan memilih bidang-bidang kegiatan yang tidak berat tugasnya, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan pikiran serta hal-hal lain lainnya (jawaban 2). Dan ketiga, pada umumnya terpaksa ikut karena ditunjuk meskipun tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga ia tidak dapat melakukan tugas yang diembankan kepadanya (jawaban 3).

Perolehan persentase untuk jawaban 1 positif di Sumbar (65%), namun kurang baik di Jabar (45,5%). Padahal jawaban 1 ini mencerminkan sikap paling

konstruktif warga dalam bekerjasama dengan sesama. Jawaban 3 yang menggambarkan bentuk kerjasama warga yang paling buruk masih saja cukup signifikan angkanya, terutama di Jabar (47%).

Temuan ini untuk Jabar seakan berlawanan dengan temuan pada unsur toleransi dan solidaritas, dua sikap yang dekat kaitannya dengan kerjasama. Sepintas yang dapat ditangkap dari temuan-temuan ini ialah bahwa masyarakat di Jabar masih mampu bekerjasama sepanjang pengorbanan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan urusan beban pikiran apalagi keuangan. Hal ini berbeda dengan warga di Sumbar yang mengabaikan pengorbanan dalam bentuk apapun, asal untuk kepentingan bersama. Sikap ini seakan merupakan pantulan dari sikap dan etos kerjasama seperti dalam ungkapan klasik Minang: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, serta banyak lagi ungkapan lain yang bermakna sama. Dari wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh di daerah ini juga ditemukan kesamaan pendapat bahwa sikap kerjasama warga di Sumbar memang masih cukup baik.

Bekerjasama secara efektif dapat dicapai bila dilakukan sesuai kiat dan etikanya. Yaitu kesediaan semua pihak untuk memberikan kontribusi yang seimbang. Bila hal ini terpenuhi, maka kerjasama akan meningkat derajat menjadi kebersamaan. Kebersamaan ini pun merupakan unsur tersendiri pula dari modal sosial. Temuan lapangan

menunjukkan kerjasama warga di kedua daerah ternyata belum maksimal, bahkan memprihatinkan yang ditandai dengan sangat rendahnya kesadaran warga akan hal ini.

Masalah yang diangkat tentang kebersamaan dalam penelitian ialah situasi yang berlaku umum di mana-mana, yaitu kerjabakti. Ternyata yang ikut karena menyadari hal itu adalah untuk kepentingan bersama sedikit sekali. Hal ini tampak nyata dari perolehan persentase pada jawaban yang diberikan. Jawaban 1 menjelaskan bahwa semua warga ikut kerjabakti karena menyadari hal itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Perolehan persentase untuk jawaban ini sangat rendah, yaitu 39,5% di Sumbar dan 23% di Jabar. Persentase yang dominan justru pada jawaban 2 yang mengatakan bahwa sebagian saja warga yang mau ikut dengan alasan ada kesibukan lain, yaitu 50,5% di Sumbar dan 61,5% di Jabar. Jawaban 3 menjelaskan kondisi bahwa sedikit sekali yang terlibat karena kurangnya kesadaran.

Karena inti dari kebersamaan adalah kontribusi yang seimbang, maka temuan di atas jelas menunjukkan bahwa untuk hal ini warga masih sulit melakukannya karena mungkin kuatir yang lain bertindak tidak sportif dengan mengemukakan kesibukan-kesibukan lain. Kemungkinan lain dari kondisi warga yang tidak positif ini ialah karena masalah yang dikemukakan adalah persoalan kerjabakti yang kadangkala cenderung dihindari karena kegiatan ini biasanya berhubungan dengan

yang kotor-kotor. Oleh sebab itu sama sekali tidak berkaitan dengan faktor daerah dan latar belakang kulturalnya.

Tanggungjawab ialah sikap mental positif yang diperlukan dalam hubungan sosial dengan sesama. Sepintas ia masih berkaitan dengan unsur-unsur modal sosial sebelumnya. Persoalan yang diangkat berkaitan dengan keberanian moral untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Terdapat tiga jawaban responden tentang tindakan yang akan dilakukan oleh orang yang melakukan suatu kesalahan sehingga merugikan orang lain, yaitu (1) mengakui terus terang kesalahan yang telah dilakukannya dan mau mengganti kerugian yang ditimbulkannya sesuai kemampuan, (2) berusaha mencari-cari alasan untuk menutup kesalahan atau mengurangi dampak kerugiannya, dan (3) mencari kambing hitam sebagai tempat untuk melemparkan kesalahan itu kepada orang lain sehingga ia bebas dari beban tanggungjawabnya.

Persentase untuk jawaban satu ternyata tidak begitu tinggi di kedua daerah. Akan tetapi, tindakan yang menceminkan sikap tidak sportif seperti pada jawaban 2, meskipun angkanya agak rendah, namun cukup signifikan. Artinya, dalam urusan tanggungjawab, warga di Sumbar dan Jabar kurang lebih sama-sama kurang bertanggungjawab. Buruknya kadar tanggungjawab warga lebih disebabkan karena tanggungjawab itu berakibat kepada beban biaya atau kerugian yang harus diganti secara materi.

Dengan demikian, faktor materilah yang lebih mempengaruhi warga tidak mampu menunjukkan sikap sportifitas atas perbuatan salah yang dilukukannya.

Tanggungjawab mungkin juga ada kaitannya dengan keterbukaan dan keterusterangan. Keterbukaan dalam penelitian ini berkenaan dengan kebiasaan warga dalam membicarakan urusan orang lain dalam bentuk bergunjing. Jawaban 1 mengatakan bahwa jarang ada yang bergunjing karena tidak ada masalah atau isu yang penting dipergunjingkan. Jawaban 2 menjelaskan dualisme sikap warga, yaitu tidak banyak yang ikut bergunjing tetapi banyak yang sekadar ingin tahu saja apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban 3 mengakui bahwa sering warga sekitar tempat tinggal responden membicarakan orang lain atau apa saja dalam batas sekadar obrolan biasa tanpa mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya.

Persentase untuk jawaban 3 yang sebenarnya mencerminkan sikap negatif warga ternyata cukup tinggi, terutama di Jabar (46%). Sikap positif yang ditandai dengan ketidaksukaan bergunjing justru kecil sekali di kedua daerah. Bila dipahami dengan menggunakan pola berpikir terbalik, sikap yang ditunjukkan warga dalam temuan ini justru negatif. Hal ini dikuatkan oleh temuan pada jawaban 3 yang bersifat negatif dengan persentase cukup tinggi. Bergunjing biasa dilakukan oleh siapa saja, tanpa ada sangkut pautnya dengan ciri daerah dan etnisitas. Kalaupun dua ciri ini ikut bermain, perannya hampir

dipastikan tidak begitu berarti. Orang-orang yang suka bergunjing lebih karena watak dan kebiasaan yang bersangkutan.

Sikap sportifitas lain yang diperlukan pula dalam membangun komunikasi yang dinamis adalah berterusterang tentang semua hal yang berkenaan dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini unsur modal sosial tentang keterusterangan diukur dari pengetahuan responden tentang keberanian orang-orang di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya dalam menyatakan keberatan ketika dimintai tolong oleh atasan atau pimpinan untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya kurang pantas. Jawaban 1 ialah pada umumnya menyatakan keberatan untuk membantu secara terus terang. Jawaban 2 sedikit lebi lunak dengan menyatakan rasa dongkolnya kepada orang lain namun tetap tidak mau membantu, sementara jawaban 3 menyatakan bahwa pada umumnya membantu juga tetapi dengan terpaksa.

Dalam temuan terlihat warga di Sumbar jauh lebih berani untuk berterusterang dengan perolehan 52% dibanding warga di Jabar dengan perolehan 37%. Sebagai prasyarat penting dalam komunikasi pada masa yang serba terbuka ini, perolehan persentase tersebut sudah dianggap baik sebagai modal untuk kedepannya. Di Jabar yang dominan adalah yang suka menggerutu sendiri (46%) dalam membantu orang lain dalam hal yang menurutnya tidak pantas dilakukan.

Persoalan dalam hal ini memang

pulan ini tentu memiliki validitas atau keberlakuan eksternal yang terbatas, yang tidak dapat dikatakan berlaku pula untuk masyarakat di daerah-daerah lain. Namun dapat diasumsikan bahwa pada daerah-daerah tertentu yang kebanyakan warga masyarakatnya mengalami depresi dan deprivasi yang lebih gawat, situasi anomie yang dialami justru berada pada tingkat yang lebih parah lagi.

Kondisi kehidupan yang tidak menguntungkan itu pula telah berdampak pada menurunnya kualitas modal sosial. Padahal, sebagai perangkat kekuatan yang terdiri dari berbagai karakter sosial, seperti amanah, solidaritas dan toleransi, modal sosial dengan kualitas cukup tinggi seyogyanya dimiliki setiap kelompok masyarakat untuk dapat melakukan interaksi yang harmonis, baik di antara sesama warga dalam satu kelompok maupun dengan warga dari kelompok lain. Tingginya tingkat anomie dan lemahnya modal sosial kiranya dapat menjelaskan mengapa berbagai kere-

sahan, kerusuhan, konflik serta berbagai perilaku antisosial lainnya dengan mudah terjadi dimana-mana.

Pengabaian yang berlarut-larut terhadap pengembangan modal sosial sebagai akibat kebijakan pembangunan yang terlalu ditekankan pada pengembangan modal ekonomi dan teknologi, serta berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hampir semua tingkatan, tampaknya telah memberi kontribusi besar pada berlangsungnya krisis multidimensional hingga saat ini. Oleh karena itu, bercermin pada pengalaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain, seperti Korea Selatan dengan program "Saemaul Undong" atau Gerakan Komunitas Baru-nya, tampaknya pemberian prioritas dan perhatian yang lebih besar pada pembangunan modal sosial merupakan salah satu kunci penting untuk dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan ini.

Katakanlah Maka” Renungkanlah apa yang sedang terjadi diseluruh langit dan bumi “ !. Tetapi tanda-tanda dan peringatan-peringatan itu tidak akan berfaedah bagi orang yang tidak mau beriman (QS.10 Yunus : 101)